

TENGGANG WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PANGGILAN DAN HARI SIDANG, SERTA HADIR TIDAKNYA PIHAK BERPERKARA PADA SIDANG PENGADILAN NEGERI, KHUSUSNYA DI D.I.Y.

Khuntoro Basuki

**Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta**

INTISARI

Dalam menetapkan hari sidang hakim harus memperhatikan jarak tempat tinggal para pihak berperkara dengan pengadilan negeri dan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang surat panggilan harus sudah diterima. Jurusita harus menyampaikan kepada yang bersangkutan pribadi, kalau tidak berhasil barulah lewat kepala desa atau lurah, kalau tidak diketahui tempat tinggalnya lewat pemerintah daerah tingkat II. Mengingat sedikitnya jurusita dan jauhnya tempat tinggal yang dipanggil, kemungkinan dapat terjadi surat panggilan langsung ditiptkan kepada kepala desa atau lurah. Tidak sampainya surat panggilan, dapat berakibat pihak berperkara tidak hadir, bahkan kemungkinan dikalahkan dalam perkaranya.

Sebagai hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1. Penentuan tenggang waktu antara pemanggilan dan hari sidang, dapat mempengaruhi dapat hadir tidaknya pihak yang dipanggil; 2. Dedikasi dan tanggung

jawab jurusita, kepala desa atau lurah dalam menyampaikan surat panggilan akan menjamin sampainya surat panggilan dan hadirnya pihak yang berperkara di persidangan.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data tenggang waktu penentuan hari sidang, pemanggilan dan sidang pertama berdasarkan berkas perkara, serta jumlah perkara yang untuk persidangannya terpaksa mengadakan pemanggilan melalui pemerintah daerah tingkat II. Di samping itu juga dikumpulkan pendapat pihak yang terkait dalam soal pemanggilan sidang, yaitu: jurusita/jurusita pengganti, advokat/pengacara dan pamong kalurahan/desa.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. banyak pamong kalurahan tidak memahami siapa yang seharusnya memanggil, 2. tenggang waktu penentuan hari sidang, pemanggilan dan hari sidang pertama cukup longgar, 3. dedikasi dan tanggung jawab jurusita/jurusita pengganti dan pamong kalurahan/desa yang melakukan panggilan cukup baik.

PENGANTAR

Hakim dalam menetapkan hari sidang termasuk jam sidang harus memperhatikan jarak tempat tinggal para pihak berperkara dengan pengadilan negeri. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti kepada yang bersangkutan pribadi di tempat kediamannya, sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang surat panggilan sudah harus diterima (Abdulkadir Muhammad, 1978: 105-106). Pasal 122 HIR memungkinkan untuk diadakan penyimpangan, yaitu dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa dan hal ini disebutkan dalam surat panggilan tersebut.

Penyampaian surat panggilan yang diserahkan kepada yang bersangkutan pribadi tidak di tempat kediamannya misalnya di tengah perjalanan atau di warung dapat dianggap sebagai pemanggilan yang tidak sah, sebagai tindakan jurusita yang ceroboh, sehingga dapat dipermasalahkan oleh pihak yang dipanggil. Demikian juga pemanggilan yang diterima kurang dari tiga hari dengan hari sidang dapat dipermasalahkan sebagai pemanggilan yang kurang layak.

Kalau karena sesuatu hal jurusita/jurusita pengganti tidak dapat menjumpai yang bersangkutan pribadi, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kepala desa/lurah, yang selanjutnya wajib meneruskan kepada yang bersangkutan secara pribadi. Kelalaian dari kepala desa/lurah tidak ada sanksinya, sebaliknya pihak yang bersangkutan

mungkin dapat dikalahkan, disebabkan tidak menerima surat panggilan tersebut (Sudikno Mertokusumo, 1988: 31). Kemungkinan dikalahkan ini maksudnya, kalau yang tidak hadir tergugat akan diputus verstek, sedangkan kalau yang tidak hadir itu penggugat akan diputus gugatan dinyatakan gugur.

Pasal 390 ayat (3) HIR menentukan bahwa: tentang orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan orang yang tidak dikenal, oleh jurusita surat panggilan disampaikan kepada bupati yang dalam wilayah hukumnya berkedudukan hakim yang berhak, bupati itu mengemukakan surat panggilan dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak tersebut. Ketentuan ini oleh R. Subekti dinilai tidak efektif dan kurang tepat untuk waktu sekarang, sebaiknya yang menempelkan surat panggilan itu jurusita di atas papan pengumuman yang khusus disediakan untuk itu dan sebaiknya juga menempelkan salinan relaas panggilan di papan pengumuman kantor kabupaten (R. Subekti, 1977: 46). Pemanggilan kepada pihak berperkara yang tidak diketahui tempat tinggalnya melalui pemerintah daerah adalah sah menurut hukum (Chaidir Ali, 1983: 111).

Sehubungan dengan hal itu perlu diteliti apakah dalam setiap pemanggilan, jurusita itu telah berusaha menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan pribadi, dan kalau tidak berhasil barulah menyampaikannya kepada kepala desa atau lurah, serta pemang-

gilan dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Di samping itu juga akan diteliti ada tidaknya putusan verstek atau putusan gugatan dinyatakan gugur.

Mengingat sampainya surat panggilan dan dalam tenggang waktu yang layak bagi pihak berperkara itu penting sekali, apakah tidak perlu dipikirkan beberapa kemungkinan yang menjamin terlaksananya hal tersebut. Kalau ada kelalaian dan akibat kelalaian tersebut sampai merugikan pihak berperkara yang bersangkutan, apakah kepada jurusita/jurusita pengganti atau pamong kalurahan/desa perlu diberi sanksi sesuai dengan kelalaiannya.

CARA PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yuridis sosiologis, di samping itu juga termasuk penelitian preskriptif. Oleh sebab itu pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan dokumentasi serta penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan terutama untuk mempelajari perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel yang membahas soal pemanggilan sidang. Sedangkan penelitian dokumentasi yang diteliti adalah data yang ada di kantor-kantor pengadilan negeri, kabupaten yang dijadikan lokasi penelitian.

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer berupa informasi dari responden yang dalam pelaksanaan tugasnya sering terkait dengan pemanggilan sidang, yaitu: jurusita/jurusita

pengganti, advokat/pengacara dan pamong kalurahan/desa.

Wawancara terhadap responden berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan, dan dilakukan secara formal pada jam kerja, kecuali terhadap responden advokat/pengacara.

Data hasil penelitian lapangan ditabulasi dalam daftar tabulasi dengan menggunakan prosentase, selanjutnya dihubungkan dengan hasil penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Diskripsi pembahasan dimaksudkan dan sekaligus juga diarahkan untuk menguji hipotesis. Selanjutnya ditarik suatu analisis yang sistematis dan logis, hubungan antara hipotesis yang telah diuji dengan konsep kerangka teoritis. Dengan demikian setelah diadakan distalasi dan kristalisasi hasil penelitian akan diperoleh data yang memberikan informasi bagaimana cara pemanggilan dan adakah faktor-faktor penghambat penyampaian surat panggilan kepada yang bersangkutan pribadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden pamong kalurahan/desa (responden PD) belum seluruhnya memahami sebutan pejabat pengadilan yang menyampaikan surat panggilan. Berbeda halnya dengan responden pengadilan negeri (responden PN) dan responden advokat (responden AD), seperti tampak pada tabel berikut ini.

TABEL I. Sebutan petugas pengadilan negeri yang menyampaikan surat panggilan sidang kepada pihak berperkara

PIHAK	RESPONDEN			JML	%
	PN	AD	PD		
Jurusita/jurusita pengganti	11	4	5	20	40,82
Jurusita	—	1	9	10	20,41
Jurusita pengganti	—	1	—	1	2,04
Panitera	—	—	1	1	2,04
Panitera pengganti	—	—	3	3	6,12
Kurang tahu nama sebutannya	—	—	14	14	28,57
JUMLAH	11	6	32	49	100,00

Sumber: Data primer 1989

Menurut pengalaman 45 responden (91,84%) pemanggilan itu tidak selalu disampaikan kepada yang bersangkutan pribadi. Adapun alasan yang dikemukakan, banyak di antara responden yang memberikan alasan lebih dari satu, hal ini seperti tampak pada tabel berikut ini.

TABEL II. Alasan surat panggilan sidang tidak disampaikan kepada yang bersangkutan pribadi

ALASAN	RESPONDEN			JML	%
	PN	AD	PD		
Yang dipanggil tidak di tempat	11	4	19	34	69,39
Telah memberi kuasa pengadilan	10	6	—	16	32,65
Yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya	11	1	3	15	30,61

Prosedur melalui pem. kalurahan	—	—	14	14	28,57
Yang dipanggil jauh dari kantor pem. kalurahan, lalu dititipkan	—	—	7	7	14,29
Yang dipanggil meninggal dunia	5	—	1	6	12,24

Sumber: Data primer 1989

Berdasarkan penjelasan responden PD dan sebagian telah teruang pada tabel II, ternyata ada jurusita/jurusita pengganti yang belum berusaha menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan pribadi dan surat panggilan itu langsung disampaikan melalui pemerintah kalurahan. Pihak pemerintah kalurahan sendiri kurang memahami bahwa hal tersebut tidak tepat, bahkan menerimanya bahwa prosedurnya memang demikian seperti yang dikemukakan oleh 14 responden PD (28,57%). Data tersebut juga diperkuat data dari 7 responden PD (14,29%) yang menyatakan kalau yang dipanggil jauh dari kantor pemerintah kalurahan surat panggilan cukup dititipkan kepada pemerintah kalurahan, yang selanjutnya untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Praktek untuk pemanggilan kepada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, jurusita pengadilan negeri mengajukan pengu-muman pemanggilan kepada bagian umum kabupaten, yang selanjutnya diberi nomor dan ditandatangani oleh Sekwilda dan dibubuhi cap ka-

bupaten. Satu lembar dari pengu-muman tersebut ditinggal untuk arsip kabupaten dan selebihnya dalam waktu 3 - 7 hari akan dikirim atau diambil sendiri oleh jurusita pengadilan negeri untuk ditempelkan pada pintu utama atau papan pengu-muman pengadilan negeri. Dari hasil penelitian ternyata masih banyak dilakukan cara pemanggilan ini seperti tampak pada tabel berikut ini.

TABEL III. Pemanggilan melalui kabupaten dalam hal pihak yang bersangkutan tidak diketahui tempat tinggalnya

PENGADILAN NEGERI	Tahun	JUMLAH		%
		Gugatan	Pengu-muman	
Pengadilan Negeri Wates	1986	17	2	11,76
	1987	23	1	4,35
	1988	18	6	33,33
Pengadilan Negeri Bantul	1986	47	4	8,51
	1987	50	6	12,00
	1988	38	10	26,32
Pengadilan Negeri Sleman	1986	62	17	27,42
	1987	78	15	19,23
	1988	82	7	8,54

Sumber: data PN Wates, PN Bantul dan PN Sleman

Setelah ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan diserahkan untuk memeriksa perkara, maka hakim tersebut akan menentukan hari dan waktu perkara itu akan diperiksa. Selanjutnya menyuruh jurusita atau jurusita pengganti melalui panitera untuk melakukan pemanggilan sidang terhadap para pihak.

Menurut pasal 122 HIR dalam menentukan hari sidang hakim hendaknya mengingat jauh letaknya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri ber-

sidang, waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari sidang lamanya tidak kurang dari 3 hari (tidak termasuk hari besar), kecuali dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa. Praktek berapa hari tenggang waktu antara hari sidang pertama dengan penyampaian surat panggilan oleh jurusita/jurusita pengganti dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

TABEL IV. Tenggang waktu antara penyampaian surat panggilan sidang dengan penentuan hari sidang pertama

TENGGANG WAKTU	RESPONDEN			JUMLAH	%
	PN	AD	PD		
Lebih dari 7 hari	5	4	10	19	38,78
7 hari (1 minggu)	6	3	24	33	67,35
3 hari - 6 hari	10	2	15	27	55,10
Kurang dari 3 hari	—	—	6	6	12,24
Tidak tahu/lupa	—	—	6	6	12,24

Sumber: data primer 1989

Data pada tabel IV memberikan gambaran bahwa berdasarkan pengalaman responden banyak yang memberikan alternatif jawaban lebih dari satu. Di samping itu diperoleh gambaran bahwa waktu bagi para pihak untuk mempersiapkan diri menghadiri sidang cukup longgar, seperti yang dikemukakan oleh 19 responden (38,78%) lebih dari 7 hari dan 33 responden (67,35%) 7 hari atau satu minggu. Kelonggaran tersebut lebih nampak lagi kalau dihubungkan dengan data rata-rata yang diperoleh dari 60 berkas perkara.

ra, sebab dari berkas perkara diperoleh rata-rata 11 hari. Hal ini berarti hakim telah berusaha sebaik-baiknya, agar pihak berperkara mempunyai cukup waktu untuk menghadiri sidang dan mempersiapkan segala sesuatunya.

Data tersebut dipengaruhi oleh cepat tidaknya jurusita atau jurusita pengganti melaksanakan perintah hakim untuk melakukan pemanggilan sidang. Berdasarkan asumsi hitungan minimal 7 hari, dengan rincian: 1 hari penentuan hari sidang, 1 hari pembuatan surat panggilan sidang, 1 hari pelaksanaan pemanggilan, 3 hari tenggang waktu dan 1 hari terakhir sebagai hari sidang, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemanggilan yang baik sampai 3 hari berikutnya (ini termasuk perhitungan tenggang waktu 2 hari). Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melakukan pemanggilan sampai 3 hari berikutnya ternyata lebih banyak ada 27 responden (55,10%) dan di antara responden banyak yang memberi alternatif jawaban lebih dari satu. Jawaban dari 16 responden (32,65%) yang semua responden pamong kalurahan/desa dapat kita abaikan, sebab mereka sulit untuk mengetahuinya, kecuali mereka yang pernah berperkara. Dari data tersebut dapatlah dikatakan bahwa dedikasi dan tanggung jawab jurusita/jurusita pengganti dan pamong kalurahan/desa cukup baik, penilaian ini diperkuat data berikut tentang: saat pelaksanaan pemanggilan, frekuensi pemanggilan, pembuatan berita

acara pemanggilan, sedikitnya putusan verstek dan atau putusan gugatan dinyatakan gugur.

Dalam menyampaikan surat panggilan jurusita/jurusita pengganti tidak terikat pada hari kerja. Mengingat dalam pemanggilan biasanya menghubungi pemerintah kalurahan lebih dahulu terpaksa lebih banyak yang dilakukan pada jam kerja, memang sampainya surat panggilan kepada yang bersangkutan pribadi lebih banyak terjadi di luar jam kerja, kalau ini dilakukan dalam jam kerja kemungkinan besar yang dipanggil tidak di rumah.

Diantarajurusita/jurusitapengganti dan pamong kalurahan/desa ada yang menyampaikan surat panggilan lebih dari 1 kali seperti yang dikemukakan oleh 18 responden (36,74%), dengan alasan di samping karena yang dipanggil tidak di tempat juga sebagai perwujudan rasa tanggung jawab dan tempat tinggalnya yang dipanggil relatif dekat.

Menurut 43 responden (87,76%) dalam setiap pemanggilan sidang jurusita/jurusita pengganti selalu membuat berita acara panggilan. Berita acara panggilan ini penting, sebab atas dasar ini hakim mulai melaksanakan sidang termasuk terpaksa mengambil putusan di luar hadirnya salah satu pihak atau para pihak berperkara. Adanya 6 responden PD (12,24%) yang menyatakan jurusita/jurusita pengganti tidak selalu atau tidak pernah membuat berita acara panggilan, ini ternyata

dari responden tersebut ada di antaranya yang hanya melaksanakan perintah kepala desa/lurah atau karena pernah menerima surat panggilan dari petugas kecamatan bahkan ada yang lewat pos. Walaupun hanya dikemukakan oleh 6 responden, tetapi hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pihak pengadilan negeri, sebab cara tersebut di luar ketentuan yang seharusnya menurut HIR.

Walaupun ada sedikit penyimpangan dalam penyampaian surat panggilan sidang dan juga sering adanya hambatan, tetapi karena tenggang waktu yang diberikan hakim cukup longgar dan lagi dedikasi khususnya dari pamong kalurahan/desa cukup tinggi atau baik, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 3 tahun (1986-1988) tidak ada putusan verstek dan putusan gugatan dinyatakan gugur sebagai akibat kesalahan jurusita/jurusita pengganti dan pamong kalurahan/desa dalam menyampaikan surat panggilan.

Data penelitian menunjukkan ada 4 responden (8,16%) yang pernah mengalami pihak penggugat yang dipanggil tidak hadir pada sidang pertama, sehingga oleh hakim gugatan diputus gugur jumlahnya ada 6 gugatan. Dalam hal ini hakim bertindak lebih tegas, diajukannya gugatan adalah kepentingan penggugat, kalau ia tidak hadir padahal panggilan telah dilakukan secara layak dan sah, maka untuk menghormati tergugat gugatan dinyatakan gugur, berbeda halnya ka-

lau yang tidak hadir tergugat, hakim akan lebih berhati-hati.

Sedang untuk putusan verstek ada 4 responden (8,16%) yang memberi jawaban pernah mengalami dan jumlahnya ada 7 putusan. Setelah diteliti ternyata data tersebut dapat diabaikan sebab 2 putusan yang dikemukakan oleh 2 responden AD ini terjadi di pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta, sedang 5 putusan lainnya yang dikemukakan oleh 2 responden PN bukan termasuk putusan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 125 HIR.

Walaupun pelaksanaan pemanggilan sidang telah berjalan lancar, artinya tidak ada yang sampai mengakibatkan dijatuhkannya putusan verstek, atau gugatan dinyatakan gugur kecuali yang terjadi karena kelalaian penggugat sendiri, perlu juga diketahui adanya hambatan-hambatannya.

Dari penelitian diperoleh hasil adanya hambatan-hambatan baik yang dialami pihak yang melakukan panggilan sidang maupun pihak yang dipanggil untuk menghadiri sidang.

Hambatan-hambatan dalam menyampaikan atau dalam meneruskan surat panggilan dikemukakan atau dialami oleh 17 responden (34,69%), yang secara berurutan berdasarkan banyaknya responden yang memberi jawaban adalah sbb.: nama tidak jelas/berbeda, kesibukan kerja yang dipanggil, alat transportasi sulit, tempat tinggal yang dipanggil jauh, yang dipanggil tidak

diketahui tempat tinggalnya, kesulitan medan dalam pemanggilan, musim penghujan, pemanggil terganggu kesehatannya, kesibukan kerja pemanggil, upah pemanggilan tak sesuai, terpanggil tak mau hadir sebab surat panggilan tanpa amplop.

Hambatan-hambatan bagi yang dipanggil untuk menghadiri sidang dikemukakan atau dialami oleh 22 responden (44,90%), yang secara berurutan berdasarkan banyaknya responden yang memberikan jawaban adalah sbb.: kesibukan kerja, alat transportasi sulit, kesehatan terganggu, tenggang waktu pemanggilan dengan sidang terlalu pendek, tempat tinggalnya jauh dari pengadilan negeri, kesulitan medan untuk datang ke pengadilan negeri, kurang paham beracara, tak ada dana, musim penghujan, takut bicara.

Untuk melengkapi data hasil penelitian dan sekaligus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam pemanggilan, kepada responden diminta untuk memberikan pendapat dan sarannya. Untuk analisis ditentukan sbb.:

- data dari responden dalam kualifikasi ragu-ragu (RR) tidak diperhatikan dan dianggap dalam garis batas;
- penentuan kualifikasi berdasarkan banyaknya prosentase jawaban responden yang menyatakan sangat setuju (SS) dan setuju (S):
 1. 60% atau lebih = sangat mendukung dan perlu diper-

hatikan;

2. 30% s/d 59% = mendukung dan dapat diperhatikan;
3. kurang dari 30% = kurang mendukung tetapi dapat dipertimbangkan, terutama kalau berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dikemukakan responden;
- jumlah prosentase jawaban responden yang menyatakan tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS) kalau sampai 30% ini dapat mengurangi daya dukung data yang dikemukakan oleh responden yang sangat setuju (SS) dan setuju (S).

Berdasarkan uraian tersebut di atas pendapat dan saran responden yang perlu diperhatikan mengingat jumlahnya 60% atau lebih dan itu tidak dilemahkan oleh jumlah jawaban responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah:

1. agar kalau pemanggilan kedua juga gagal panggilan disampaikan melalui kades/lurah disertai tembusan kepada kadus/dukuh dan keluarganya yang tinggal serumah dengan yang dipanggil (85,76%);
2. agar setiap pengadilan negeri mempunyai jurusita yang cukup (85,71%);
3. agar kalau yang dipanggil tidak dijumpai hendaknya panggilan diulangi (83,68%);
4. agar jurusita/jurusita pengganti dan kades/lurah di up grade (81,64%);
5. agar disediakan kendaraan dinas (bagi jurusita/jurusita

pengganti) khusus untuk pemanggilan (79,59%);

6. agar pemanggilan kepada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya ditempelkan di papan pengumuman pengadilan negeri oleh pihak pengadilan negeri, sedang tembusannya disampaikan kepada kabupaten, dan dimungkinkan dilengkapi pemanggilan melalui media masa (radio, surat kabar) (77,55%);
7. agar dalam setiap pemanggilan pemerintah kalurahan diberitahu atau diberi tembusannya (73,47%);
8. agar jurusita/jurusita pengganti atau aparat kalurahan/desa yang lalai dikenai sanksi (65,31%);
9. agar biaya atau upah pemanggilan ditingkatkan (63,26%);
10. agar pemanggilan kepada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya ditempelkan di papan pengumuman pengadilan negeri oleh pihak pengadilan negeri, sedang tembusannya disampaikan kepada kabupaten (61,23%);

Sedangkan pendapat dan saran selebihnya: agar tenggang waktu pemanggilan diperlonggar (48,98%) termasuk mendukung dan dapat diperhatikan; agar nama terpanggil jelas dan pemanggilan pada jam kerja (masing-masing hanya 6,12%) termasuk kurang mendukung, tetapi mengingat dalam penelitian ada 7 responden PD (14,29%) yang mendapat hambatan sehubungan de-

ngan hal ini, maka datanya dapat dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Dari data penelitian yang diperoleh dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Banyak pamong desa atau pamong kalurahan tidak memahami siapa yang seharusnya memanggil. Terbukti banyak yang tidak tahu pasti sebutan petugas pengadilan yang melakukan panggilan, di samping itu juga banyak yang menganggap bahwa prosedur pemanggilan itu melalui pemerintah kalurahan jadi jurusita/jurusita pengganti tidak langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan pribadi.

2. Penentuan tenggang waktu antara pemanggilan dan sidang pertama cukup longgar, sebab responden banyak menyatakan 7 hari atau lebih dan ini nampak lebih longgar lagi menurut berkas perkara rata-rata 11 hari.

3. Dedikasi dan tanggung jawab jurusita/jurusita pengganti cukup tinggi, lebih-lebih pamong desa atau pamong kalurahan, mereka dalam menyampaikan surat panggilan banyak yang tidak terikat jam kerja dan di antaranya ada yang sampai berusaha menjumpai yang bersangkutan lebih dari 1 kali.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah mem-

beri fasilitas dan mengusahakan biaya penelitian, Ibu DR. Maria S.W. Sumardjono, SH., MCL., MPA. yang telah memberikan pe-

ngarahan dan Bapak Sutanto, SH. MS selaku pembantu peneliti, serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad: 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
 Chaidir Ali: 1983, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Nur Cahaya, Yog-

yakarta.

- Subekti, R.-: 1977, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
 Sudikno Mertokusumo: 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta.